

ABSTRAK

Salah satu persoalan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk desa salah satunya yaitu terjadinya kekosongan jabatan kepala desa. Dalam hal kepala desa meninggal dunia sebelum berakhirnya masa jabatan, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Penjabat Kepala Desa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip demokrasi dalam pengangkatan penjabat Kepala Desa di desa Bogem Pinggir Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo oleh Bupati tanpa adanya keterlibatan partisipasi masyarakat dan bagaimana efektivitas pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bogem Pinggir Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan proses penunjukan Penjabat Kepala desa tidak melibatkan partisipasi aktif unsur masyarakat desa. Tidak adanya keterlibatan masyarakat desa, baik melalui forum musyawarah desa maupun bentuk konsultasi publik lainnya. Bahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak diberikan ruang sama sekali dalam proses penunjukan Penjabat Kepala Desa. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terkait efektivitas pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bogem Pinggir Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari 3 kriteria penilaian dalam mengukur efektivitas kinerja yaitu: Kemampuan adaptasi, pencapaian tujuan, dan kepuasan kerja menurut teori Richard M. Steers tidak ada satupun yang memenuhi. Maka dalam hal pengangkatan Penjabat Kepala di desa Bogem Pinggir Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dikatakan tidak efektif.

Kata Kunci: Penjabat Kepala Desa – Partisipasi Masyarakat – Efektivitas – Demokrasi